

# PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM AKTUALISASI ORGANISASI SEKOLAH

Azwarita (SMPN 1 Pendopo)

Rohiat, Manap Soemantri (Prodi MAP FKIP Unib)

e-mail: [AzwaritaS.Pd@mail.Com](mailto:AzwaritaS.Pd@mail.Com)

**Abstract:** Advisory the purpose of this research was to describe the actualisation of committee as a given of the solution, supporting, controlling, mediator in SMP Negeri 02 Pendopo Barat. The metode that we use in this research is descriptif kualitatif. Collecting the data by using observation, questioner, documentation and interview. The result of the research is present that committee as a given of solution has seen. Committee have given their solution such as in infrastructure has helped by committee to the school organisation. While in identification of education source, education and learning proses has not been actively pressen, but in their motivation has seen by organize of infra stucture and their edorsement unmateri or contribution and advice. In their controlling in planning of the school has not done by them, then in their role as committee, aspecialy in the field of quality of student achipment. Every in the end of years learning teaching proces in the school the teacher only report to committee that, the final examination has done and all of the student has passed and could continued to the junior high school or other. As a mediator committee has been run well as a conection between prent and teacher.

Keyword : Committes Role, School Organization

**Abstrak:** Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan bagaimana aktualisasi peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol dan mediator di SMP Negeri 02 Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, pengumpulan data menggunakan tehnik observasi, kuisioner, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan sudah terlihat dalam hal memberi pertimbangan tentang sarana dan prasarana yang dapat diperbantukan di sekolah, sedangkan peran mengidentifikasi sumber daya pendidikan, proses pengelolaan pendidikan dan proses pembelajaran belum menunjukkan perannya secara optimal. Peran komite sekolah sebagai badan pendukung terlihat dalam hal dukungan materil berupa pengelolaan sarana dan prasarana dan dukungan non materi dalam bentuk sumbangan pemikiran dan ide-ide. Peran komite sekolah sebagai pengontrol dan pengawasan belum menunjukkan kinerjanya. Peran komite sekolah sebagai mediator telah berjalan dalam hal menjadi penghubung antara komite sekolah dengan masyarakat.

Kata Kunci: Peran Komite, Organisasi Sekolah

## PENDAHULUAN

Kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusia (SDM). Untuk meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) sangat disadari oleh pemerintah berasal dari pendidikan yang bermutu dan berdaya saing. Pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang mampu melakukan proses pematangan kualitas peserta didik dan sistem perencanaan yang baik. Agar tujuan penyelenggaraan pendidikan berjalan dengan baik pemerintah telah berupaya melakukan pengembangan dan perbaikan kurikulum, sistem evaluasi, perbaikan sarana dan

prasarana pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi ajar, pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya serta adanya hubungan yang baik antara sekolah dan masyarakat.

Bentuk nyata hubungan antara sekolah dan masyarakat adalah dibentuknya Komite Sekolah melalui Keputusan menteri Pendidikan Nasional No. 14 tahun 2002 sebagai pengganti badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3). Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di

satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra-sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan di luar sekolah. Menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 044/4/2002 pada tanggal 2 April. Komite Sekolah berperan :1) Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan. 2) Pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. 3) Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran secara sinergis dalam bentuk saran dengan pendidikan di satuan pendidikan dan 4) Mediator antara pemerintah (*eksekutif*) dengan masyarakat di satuan pendidikan

Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, orang tua dan masyarakat, sehingga adanya kebijakan untuk melibatkan partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang terkandung dalam konsep komite sekolah merupakan suatu usulan terbaik dalam rangka usaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Berbagai fakta yang ada di lapangan setelah konsep komite sekolah di terapkan ternyata tidak sesuai dengan hakekat makna yang terkandung dalam konsep itu sendiri. Dalam aktualisasinya peran komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan kurang jelas, kurang aktif dan kurang terlihat hasilnya, Komite sekolah hanya formalitas dalam suatu satuan pendidikan, hanya berperan sebagai pendanaan dibanding berperan dalam proses pembelajaran.

Pelaksanaan dan penerapan peran komite sekolah secara optimal memerlukan proses, mulai dari tingkat sosialisasi dan menyadarkan perlunya peran komite sekolah baik pada komite sekolah, wali murid, masyarakat sekitar

maupun penyelenggara pendidikan sebagai peluang partisipasi masyarakat dibidang pendidikan. Tingkat berikutnya menyebarluaskan konsep pelibatan publik dalam komite sekolah kepada masyarakat dalam penyelenggara pendidikan. Berikutnya yaitu penyelenggara pendidikan melakukan konsultasi kemasyarakat untuk mendapatkan masukan dalam proses menetapkan kebijakannya, kerja sama segenap potensi yang ada dimasyarakat secara sinergis dalam bentuk saran dengan penyelenggaraan pendidikan. Berikutnya adalah penyelenggara pendidikan melakukan konsultasi di masyarakat untuk mendapatkan masukan dalam proses menetapkan kebijakannya, kerjasama segenap potensi yang ada di masyarakat

penyelenggaraan pendidikan memutuskan kebijakan. Tujuan akhir adalah terlaksananya peran komite sekolah sesuai dengan keputusan menteri pendidikan No 44/4/2002.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti Keadaan yang ada di lapangan menunjukkan komite sekolah sebagai lembaga mandiri kurang berfungsi sesuai dengan perannya yang telah ditentukan dan hanya berfungsi saat rapat diawal tahun pelajaran dan diakhir tahun pelajaran untuk melakukan penggalangan dana pada orang tua siswa serta juga adanya indikasi komite sekolah kurang berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pendidikan.

Rumusan masalah penelitian secara umum adalah tentang aktualisasi peran komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya rumusan masalah khusus adalah: 1) Bagaimanakah peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan? 2) Bagaimanakah Peran Komite Sekolah sebagai pendukung? 3) Bagaimanakah peran komite sekolah sebagai pengontrol? dan 4) Bagaimanakah

peran komite sekolah sebagai mediator dalam penyelenggaraan pendidikan di SMP Negeri 2 Pendopo Barat?

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran yang kongkrit tentang Aktualisasi Peran komite Sekolah dalam penyelenggaraan Pendidikan di SMP Negeri 2 Pendopo Barat. Sedang tujuan khusus yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: a) Mendeskripsikan peran Komite sekolah sebagai pemberi Pertimbangan (*Advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di SMP Negeri 02 pendopo Barat. b) Mendeskripsikan peran Komite sekolah sebagai Pendukung (*Supporting agency*) baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di SMP Negeri 02 Pendopo Barat. c) Mendeskripsikan peran Komite Sekolah sebagai Pengontrol (*Controlling agency*) dalam transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di SMP Negeri 2 Pendopo Barat. d) Mendeskripsikan peran komite sebagai mediator antara sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di SMP Negeri 02 Pendopo Barat.

## **METODE**

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2009) penelitian kualitatif memiliki beberapa karakteristik, antara lain yaitu *Qualitatif research is a multi-method in focus, involving an interpretative naturalistic approach to its subject matter* (Penelitian kualitatif menggunakan pendekatan naturalistik dan interpretatif terhadap fokus kajiannya).

Menurut Lofland dalam Moleong (2005) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lainnya. Dalam penelitian kualitatif berbicara

tentang informan dan aktor/pelaku, kata-kata dan tindakan informan dan pelaku itulah yang dijadikan sumber data untuk diamati/diobservasi dan diminta informasinya melalui wawancara/diskusi/dokumentasi.

Orang yang dimintai informasinya disebut *key informans* atau informan kunci yang dipilih orang-orang yang benar-benar mengetahui beberapa permasalahan yang akan diteliti. Peneliti mengumpulkan data bergerak dari informan satu ke informan lainnya sampai data dianggap selesai terkumpul, ini sering disebut *snow ball*, karena bergerak seperti bola salju yang bergerak menggelinding makin besar

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peranan Komite Sekolah Sebagai Pemberi Pertimbangan (*Advisory agency*)**

Peran komite sekolah sebagai badan Pemberi pertimbangan yang diharapkan oleh pemerintah menurut Depdiknas (2004) jika sudah melaksanakan indikator-indikator berikut ini: 1) mengidentifikasi sumberdaya pendidikan dalam masyarakat, 2) Memberikan masukan untuk penyusunan RAPBS, 3) Menyelenggarakan rapat RAPBS, 4) Memberikan pertimbangan perubahan RAPBS dan ikut mengesahkan RAPBS bersama kepala sekolah. 5) Memberikan masukan terhadap proses pengelolaan pendidikan, 6) Memberikan masukan terhadap proses pembelajaran kepada para guru, 7) Memberikan pertimbangan tentang tenaga kependidikan yang dapat diperbantukan di sekolah, 8) Memberikan pertimbangan tentang sarana prasarana yang dapat diperbantukan di sekolah, 9) Memberikan pertimbangan tentang

anggaran yang dapat dimanfaatkan disekolah.

Kenyataan yang ada di lapangan, berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan menunjukkan bahwa dari sembilan indikator peran komite sebagai pemberi pertimbangan diatas hanya empat indikator peran komite yang sudah dilaksanakan diantaranya menghadiri rapat RAPBS, mengesahkan RAPBS, mempertimbangkan sarana dan prasarana yang dapat diperbantukan sekolah dan mempertimbangkan anggaran sekolah yang berasal dari swadaya masyarakat, sedangkan lima peran yang lain belum dilaksanakan oleh komite sekolah, hal ini menunjukkan bahwa peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan hanya sebatas memberi pertimbangan tentang sarana dan prasarana yang dapat diperbantukan disekolah, sedangkan peran komite sekolah dalam mengidentifikasi sumber daya pendidikan, proses pengelolaan pendidikan dan proses pembelajaran belum menunjukkan kinerjanya, bahkan komite sekolah tidak memahami dan tidak mengetahui bahwa hal tersebut merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab mereka.

Peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan di SMP Negeri 2 Pendopo Barat, pelaksanaannya hanya dalam bentuk pemberian masukan dan pemikiran dalam hal sarana dan prasarana saja sebenarnya masih banyak bentuk pertimbangan lain yang harusnya diberikan oleh komite sekolah sesuai dengan indikator peran komite yang diharapkan sesuai dengan petunjuk. Kurang berperannya komite sekolah dalam pemberian pertimbangan khususnya di SMP Negeri 02 Pendopo disebabkan karena kurangnya pemahaman para komite sekolah tentang perannya seperti yang tercantum dalam Kepmen No. 044 tahun 2002, sehingga

sangat penting adanya sosialisasi tentang peran komite yang ideal menurut Depdiknas (2004), bimbingan dan arahan kepada komite sekolah agar mereka memahami tentang perannya sebagai pemberi pertimbangan.

### **Peranan Komite Sekolah Sebagai Pendukung (*Supporting agency*)**

Peran komite sekolah sebagai pendukung yang ideal adalah jika sudah melaksanakan peran-peran berikut; 1). Memantau Kondisi ketenagaan pendidikan sekolah, 2) Mobilisasi guru sukarelawan untuk menanggulangi kekurangan guru di sekolah, 3) Mobilisasi tenaga kependidikan non guru untuk mengisi kekurangan guru di sekolah, 4) Memantau kondisi sarana dan prasarana yang ada di sekolah, 5) Mobilisasi bantuan sarana dan prasarana sekolah, 6) Mengkoordinasi dukungan sarana prasarana sekolah, 7) Mengevaluasi pelaksanaan dukungan sarana dan prasarana sekolah, 8) Memantau kondisi anggaran pendidikan di sekolah, 9) Memobilisasi dukungan terhadap anggaran pendidikan di sekolah, 10) Mengkoordinasi dukungan terhadap anggaran pendidikan di sekolah (Depdiknas, 2004).

Kenyataan yang ada di lapangan menunjukkan bahwa peran komite sekolah sebagai pendukung belum terlaksana dengan optimal, hal ini terbukti dari hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan menunjukkan bahwa dari sepuluh (10) indikator peran komite sekolah sebagai pendukung, hanya enam (6) indikator peran komite yang sudah dilakukan oleh komite sekolah dan itupun belum dilaksanakan secara rutin dan terjadwal yaitu memantau kondisi sarana dan prasarana yang ada di sekolah, mobilisasi bantuan sarana dan prasarana sekolah, mengkoordinasi dukungan sarana prasarana sekolah, mengevaluasi

pelaksanaan dukungan sarana dan prasarana sekolah, memantau kondisi anggaran pendidikan di sekolah, memobilisasi dukungan terhadap anggaran pendidikan di sekolah, mengkoordinasi dukungan terhadap anggaran pendidikan di sekolah.

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa peran komite sekolah sebagai badan pendukung sudah terlihat dalam hal dukungan materi berupa dukungan sarana mulai dari penyediaan tanah untuk pembangunan sekolah merupakan hibah dari masyarakat setempat, pengelolaan sarana dan prasarana sekolah misalnya pembuatan musholla merupakan swadaya dari masyarakat sekitar dan wali murid serta dukungan non materi dalam bentuk sumbangan pemikiran dan ide-ide. Dukungan dalam bentuk pengelolaan anggaran yang berasal dari pemerintah pusat (misalnya dana BOS) dan pemerintah daerah belum dilaksanakan sepenuhnya, tetapi dipercayakan sepenuhnya kepada pihak sekolah.

Dukungan anggaran yang dikelola oleh komite sekolah adalah dana yang berasal dari swadaya masyarakat untuk pengadaan atau perbaikan sarana dan prasarana, biasanya dilakukan diawal tahun ajaran baru itupun sangat sulit untuk dikoordinasi karena sebagian besar masyarakat/wali murid beranggapan bahwa sekolah negeri memiliki dana yang berasal dari pemerintah pusat yaitu dalam bentuk dana BOS serta pemahaman mereka tentang sekolah gratis bahwa tugas dan tanggung jawab pendanaan sekolah merupakan tanggung jawab pemerintah. Sangat penting sekali peran komite sekolah dalam menumbuhkan peran aktif masyarakat terhadap pendidikan khususnya di SMP Negeri 2 Pendopo Barat dan di Indonesia pada umumnya.

Rendahnya dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat, dan

lemahnya peran komite sekolah sebagai pendukung dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya, peran komite sekolah dalam bentuk materi misalnya dukungan dana akhir-akhir ini sering dipermasalahkan oleh berbagai lembaga swadaya masyarakat dan sering dianggap sebagai pungli, karena sekolah jenjang SMP sudah mendapatkan dana BOS. Penggalangan dana untuk pengadaan sarana dan prasarana bersifat sangat sensitif. Apabila ada dana bantuan dari masyarakat selalu di persiapkan sehingga komite sekolah bersikap pakum dalam pemberian dukungan dalam bentuk materi atau pendanaan. Akibatnya semua program kerja dan operasional sekolah hanya tergantung dari jumlah dana yang diterima dari pemerintah pusat dan daerah. Komite sekolah hendaknya punya gebrakan baru diantara mengikutsertakan pihak-pihak pengusaha agar peduli terhadap dunia pendidikan.

Sejalan dengan penelitian Ali Hanafia (2006) menyatakan bahwa peran komite sekolah belum memenuhi fungsinya sebagai lembaga yang mampu memanifestasikan keterwakilan stakeholder pendidikan, dalam arti belum mampu mewakili keinginan stakeholder dalam membenahi dan memajukan pendidikan. Proses pembentukan dan pengisian personil yang menjadi pengurus dan anggota komite sekolah tidaklah sebagaimana yang diharapkan. Kenyataan yang ada di lapangan menunjukkan bahwa komite sekolah lebih dominan dibentuk oleh kepala sekolah dan anggota komite yang terpilih menjadi pengurus didominasi oleh orang-orang yang memiliki hubungan dekat atau sejalan dengan kepala sekolah, walaupun orang tersebut secara spesifik tidak memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas tentang dunia pendidikan. Pembentukan komite sekolah yang terkesan asal tunjuk, diperkuat lagi sikap anggota komite

sekolah yang terpilih bersifat acuh dengan persoalan yang muncul dan berkembang sekitar persekolahan. Sikap acuh ini menunjukkan gambaran rendahnya kualitas anggota komite dan sekaligus juga gambaran dari kepedulian masyarakat terhadap perkembangan pendidikan di sekolah yang masih sangat rendah.

### **Peranan Komite Sekolah Sebagai Pengontrol (*Controlling Agency*)**

Peran komite sekolah sebagai pengontrol yang diharapkan menurut Depdiknas (2004) jika telah melaksanakan indikator berikut ini: 1) Mengontrol proses pengambilan keputusan di sekolah, 2) Mengontrol kualitas kebijakan di sekolah, 3) Mengontrol proses perencanaan pendidikan di sekolah, 4) Pengawasan terhadap kualitas perencanaan sekolah, 5) Pengawasan terhadap kualitas program sekolah. 6) Mengontrol proses pengambilan keputusan di sekolah, 7) Memantau organisasi sekolah, 8) Memantau penjadwalan program sekolah, 9) Memantau alokasi anggaran untuk pelaksanaan program sekolah, 10) Memantau sumber daya pelaksanaan program sekolah, 11) Memantau partisipasi stakeholder pendidikan dalam pelaksanaan program sekolah, 12) Memantau hasil ujian akhir, 13) Memantau angka partisipasi sekolah, 14) Memantau angka mengulang di sekolah, 15) Memantau angka bertahan di sekolah.

Kenyataan yang ada dilapangan menunjukkan bahwa peran komite sekolah sebagai pengontrol cukup mengkhawatirkan karena dari lima belas indikator yang ditanyakan oleh penulis hanya tiga indikator saja yang sudah dilaksanakan oleh komite sekolah dan itupun belum optimal yaitu perannya dalam memantau sumber daya pelaksanaan program sekolah, memantau partisipasi stakeholder pendidikan dalam

pelaksanaan program sekolah, memantau hasil ujian akhir. Dalam memantau hasil ujian akhir setiap akhir tahun ajaran biasanya pihak sekolah hanya melaporkan hasil ujian akhir kepada komite sekolah sehingga secara otomatis komite sekolah kan mengetahui hasil ujian akhir siswa.

Peran komite sekolah sebagai pengontrol (*controlling agency*) diharapkan dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan program dan kebijakan sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Pengawasan yang dilakukan komite SMP Negeri 2 Pendopo Barat, belum menunjukkan perannya dengan baik terutama dalam mengontrol proses pengambilan keputusan di sekolah, mengontrol kualitas kebijakan di sekolah, mengontrol proses perencanaan pendidikan di sekolah, pengawasan terhadap kualitas perencanaan sekolah, memantau organisasi sekolah, memantau penjadwalan program sekolah, memantau alokasi anggaran untuk pelaksanaan program sekolah, memantau sumber daya pelaksanaan program sekolah, memantau program sekolah. kurangnya peran komite sekolah sebagai pengontrol disebabkan karena kurangnya pemahaman tentang hal tersebut sehingga sangat perlu adanya sosialisasi dan pelatihan tentang peran komite sekolah yang telah ditentukan. Alternatif lain yang dapat digunakan untuk memaksimalkan peran komite sekolah sebagai pengontrol adalah memberdayakan dan memberikan keleluasaan komite sekolah mungkin menjadi suatu alternatif dalam melakukan kontrol.

Keterlibatan komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan sangat menentukan kualitas dan mutu sekolah, sehingga komite sekolah harus benar-benar memahami dimulai dari penyusunan Visi misi sekolah, pembuatan RAPBS. Keterlibatan komite

sekolah mulai dari proses awal dapat memungkinkan komite sekolah melakukan pengawasan secara profesional dan terarah, hal ini dirasa sangat penting karena kontrol atau pengawasan dari internal sekolah sangat sulit diharapkan sebagian besar guru dan siswa tidak mengetahui informasi yang lengkap tentang pendanaan dan program sekolah dan adanya rasa takut karena posisinya sebagai bawahan jika melakukan kritik dan saran dianggap terlalu ikut campur, sehingga sebagian terkesan masa bodoh dalam memberikan pengawasan pendanaan. Ketertutupan pengelolaan dana di tingkat sekolah dilakukan oleh kepala sekolah sehingga guru dan siswa tidak bisa melakukan kontrol terhadap pengelolaan dana proyek tersebut. Kondisi ini memerlukan keterlibatan dan kontrol dari masyarakat, khususnya komite sekolah. Hal ini penting untuk menghindari penyelewengan dan memenuhi aspek transparansi dalam pengelolaan pendidikan dan dana pendidikan. Selama ini keterlibatan masyarakat selalu diartikan menarik dana dari masyarakat untuk pendidikan, terutama sekolah. Setelah itu masyarakat hampir tidak pernah diberi tahu bagaimana dan untuk apa penggunaan dana tersebut (Muslim, M., 2003).

### **Peranan Komite Sekolah Sebagai Mediator**

Peran komite sekolah sebagai mediator atau penghubung yang ideal adalah jika sudah melaksanakan indikator-indikator berikut dengan optimal: 1) menjadi penghubung antara komite sekolah dengan masyarakat, komite sekolah dengan sekolah, dan komite sekolah dengan dewan pendidikan. 2) mengidentifikasi aspirasi masyarakat dan perencanaan pendidikan, 3) membuat usulan kebijakan dan program pendidikan kepada sekolah. 4)

mensosialisasikan kebijakan dan program sekolah kepada masyarakat. 5) memfasilitasi berbagai masukan kebijakan program terhadap sekolah. 6) menampung pengaduan dan keluhan terhadap kebijakan. 7) mengidentifikasi kondisi sumber daya di sekolah. 8) Mengidentifikasi sumber-sumber daya masyarakat. 9) Mobilisasi bantuan masyarakat, 10) Mengkoordinasi bantuan masyarakat. 11) Mengkomunikasikan pengaduan dan keluhan masyarakat terhadap sekolah (Depdiknas, 2004)

Kenyataan yang ada dilapangan menunjukkan bahwa peran komite sekolah sebagai mediator sudah berjalan cukup baik, berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan dari sebelas indikator peran komite sekolah sebagai mediator yang di harapkan oleh pemerintah sembilan diantaranya sudah dilaksanakan cukup optimal oleh komite sekolah, yaitu: 1)menjadi penghubung antara komite sekolah dengan masyarakat, komite sekolah dengan sekolah, dan komite sekolah dengan dewan pendidikan. 2) mensosialisasikan kebijakan dan program sekolah kepada masyarakat. 3) memfasilitasi berbagai masukan kebijakan program terhadap sekolah. 4) menampung pengaduan dan keluhan terhadap kebijakan. 5) mengidentifikasi kondisi sumber daya di sekolah. 6) mengidentifikasi sumber-sumber daya masyarakat. 7) mobilisasi bantuan masyarakat, 8) mengkoordinasi bantuan masyarakat. 9) mengkomunikasikan pengaduan dan keluhan masyarakat terhadap sekolah. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peran sebagai mediator dilaksanakan tidak secara rutin tetapi saat tertentu jika dibutuhkan, misalnya saat ada kesalahpahaman antara orang tua siswa dengan pihak sekolah maka pihak sekolah meminta bantuan komite sekolah sebagai perantara. Selanjutnya peran

mediator juga dilaksanakan saat awal tahun dalam rangka penerimaan siswa baru dan diakhir tahun saat pelepasan siswa kelas IX (Sembilan).

Peran komite sekolah sebagai mediator sudah berjalan cukup optimal ternyata berdampak positif terhadap sekolah diantaranya berbagai permasalahan pendidikan yang muncul, mulai dari kekerasan antar siswa dengan siswa, siswa yang selalu melanggar tata tertib yang ada di sekolah misalnya kebiasaan membawa senjata tajam, pemahaman orang tua siswa yang kadang memiliki pandangan dan persepsi berbeda tentang suatu masalah, sistem keterbukaan dan hubungan komunikasi yang baik dengan masyarakat dapat diselesaikan secara baik-baik sehingga akan timbul keharmonisan antara orang tua siswa sebagai masyarakat dan pihak sekolah sebagai lembaga pendidikan.

Beberapa indikator yang belum dilaksanakan oleh komite sekolah sebagai mediator adalah dalam mensosialisasikan kebijakan dan program sekolah kepada masyarakat, belum dilaksanakan peran tersebut karena komite sekolah menganggap bahwa program sekolah merupakan wewenang sekolah, berdasarkan hasil observasi dan wawancara komite sekolah sendiri kurang memahami program sekolah, ditambah antusias masyarakat untuk mengetahui program sekolah yang sangat rendah.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang peran komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan di SMP Negeri 2 Pendopo Barat dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan sudah terlihat dalam hal memberi pertimbangan tentang sarana dan prasarana yang

dapat diperbantukan disekolah, sedangkan peran mengidentifikasi sumber daya pendidikan, proses pengelolaan pendidikan dan proses pembelajaran belum menunjukkan perannya, hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman para komite sekolah tentang indikator peran komite sekolah seperti yang tercantum dalam Kepmen No. 044 tahun 2002 dan terlalu banyaknya kesibukan pekerjaannya masing-masing.

2. Peran komite sekolah sebagai badan pendukung terlihat dalam hal dukungan materi berupa pengelolaan sarana dan prasarana dan dukungan non materi dalam bentuk sumbangan pemikiran dan masukan. Dukungan dalam bentuk pengelolaan anggaran yang berasal dari pemerintah pusat (misalnya dana BOS) dan pemerintah daerah belum dilaksanakan sepenuhnya, tetapi dipercayakan pada pihak sekolah. Dukungan anggaran yang dikelola oleh komite sekolah adalah dana yang berasal dari swadaya masyarakat untuk pengadaan atau perbaikan sarana dan prasarana, biasanya dilakukan diawal tahun ajaran baru itupun sangat sulit untuk dikoordinasi karena sebagian besar masyarakat/wali murid beranggapan bahwa sekolah negeri memiliki dana yang berasal dari pemerintah pusat yaitu dalam bentuk dana BOS serta pemahaman mereka tentang sekolah gratis bahwa tugas dan tanggung jawab pendanaan sekolah merupakan tanggung jawab pemerintah.
3. Peran komite sekolah sebagai pengontrol belum aktif menunjukkan perannya terutama dalam hal mengontrol perencanaan pendidikan di sekolah, memantau program sekolah, termasuk juga memantau

output pendidikan. Perencanaan Pendidikan Setiap akhir tahun ajaran biasanya pihak sekolah hanya melaporkan hasil ujian akhir kepada komite sekolah. kurangnya peran komite sekolah sebagai pengontrol disebabkan karena kurangnya pemahaman tentang hal tersebut sehingga sangat perlu adanya sosialisasi dan pelatihan tentang peran komite sekolah yang telah ditentukan

4. Peran komite sekolah sebagai mediator belum menunjukkan perannya secara optimal. Dalam hal menjadi penghubung antara komite sekolah dengan masyarakat, menampung pengaduan dan keluhan masyarakat terhadap kebijakan sekolah dan mengkomunikasikannya, telah dijalankan tetapi dalam hal mensosialisasikan kebijakan dan program sekolah kepada masyarakat belum dilaksanakan perannya karena komite sekolah menganggap bahwa program sekolah merupakan wewenang sekolah, ditambah antusias masyarakat untuk mengetahui program sekolah yang sangat rendah

### Saran

Setelah melakukan penelitian tentang Aktualisasi peran Komite Sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan di SMP Negeri 02 Pendopo, penulis mengajukan beberapa saran, Agar peran komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan lebih optimal, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dan instansi terkait (stakeholder), berdasarkan kesimpulannya itu:

1. Bagi Pihak Sekolah diharapkan
  - a. Pihak sekolah dapat memberi ruang, keleluasaan dan

keterlibatan Komite Sekolah dalam hal kurikulum dan program pembelajaran di sekolah.

- b. Menjaga hubungan yang harmonis dengan komite sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan, jangan sampai komite sekolah dianggap sebagai alat legalitas semata, karena peranan komite sekolah sangat membantu dalam penyelenggaraan pendidikan.
  - c. Peran komite sekolah agar di sosialisasikan dan dikembangkan sebagai bagian dari unsur sekolah yang ikut bertanggung jawab dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan.
  - d. Menjaga hubungan baik dengan selalu berkomunikasi kepada guru, staf, komite sekolah dan masyarakat
  - e. Sekolah perlu melakukan reorganisasi komite sekolah secara berkala, pemilihan dan penunjukan komite sekolah dilakukan dengan baik dan profesional sesuai dengan proses yang diatur dalam kepmendiknas 044/U/2002.
  - f. Harus adanya pengawalan dari pihak pemerintah yang berwenang untuk mengontrol kinerja peran komite sekolah, agar berjalan lebih optimal.
2. Bagi komite sekolah SMP Negeri 02 Pendopo
    - a. Pengurus Komite sekolah agar senantiasa meluangkan waktunya secara berkala untuk melaksanakan peran dan fungsinya di sekolah.
    - b. Komite sekolah harus mampu berperan secara aktif guna melibatkan partisipasi semua unsur sekolah.
    - c. Peran komite sekolah perlu disosialisasikan secara

- komprehensif kepada guru dan kepala sekolah, dengan tujuan untuk menghindari persepsi yang berbeda dari komite sekolah.
- d. Peran komite sekolah sebagai mediator agar dapat dioptimalkan, terutama dalam kerjasama dengan dunia usaha, maupun pemerintah. Kegiatan pertemuan komite sekolah perlu dilaksanakan lebih efektif, agar pemantauan terhadap segala kegiatan dan peningkatan terhadap kualitas penyelenggaraan pendidikan dapat didukung semua unsur.
  - e. Menjaga hubungan yang harmonis dengan kepala sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan
  - f. Peran kepengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan perlu didukung dengan rencana kerja komite.
3. Peneliti Selanjutnya.
- a. Agar meneliti faktor-faktor yang dapat mengungkapkan lemahnya peran komite sekolah
  - b. Meneliti tentang cara-cara untuk mengoptimalkan peranan komite sekolah agar berjalan lebih optimal

## DAFTAR RUJUKAN

- Ali Hanapiah Muhi. (2006). *Eksistensi Komite Sekolah*, jurnal.
- Depdiknas, (2004). *Acuan Operasional dan Indikator Kinerja Komite Sekolah*, Jakarta.
- Moleong, L.Y. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi revisi . Bandung: PT Penerbit Remaja Rosdakarya
- Muslim, M., (2003). *Transparansi Anggaran Pendidikan dan Peran Komite Sekolah*.  
<http://www.antikorupsi.org/mod.php>
- Sugiyono, (2009). *Memahami penelitian kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta